

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA SELATAN**

HIBZON

*Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,  
Jalan Palembang-Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

### **ABSTRACT**

*The purposed of this research is to analyze the factors with influence Pendapatan Asli Daerah (PAD) of South Sumatera Province. Data used in this research is secondary, such as gross domestic product, PAD, Population, and income percapita. Estimated regression show there is positive correlation between PAD, population, economics growth and income percapita.*

*Key Words : PAD, economic growth, population, income percapita.*

---

### **PENDAHULUAN**

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Pada prinsipnya pemberian otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, adalah bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah serta pelayanan publik akan dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Basri (2002: 171), bahwa salah satu pilar yang harus ditegakkan dalam mengembangkan otonomi daerah yang lebih nyata adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tugas dan tanggung jawab dengan aspek pendanaan, maka esensi dari otonomi menjadi kabur.

Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, kemandirian dalam pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah makin diperlukan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber dan potensi daerah. Lebih spesifik lagi, otonomi daerah merupakan suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki daerah secara optimal (Basri, 2002: 177).

Untuk mendukung hal itu, pemerintah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, maka dikeluarkan undang-undang mengenai desentralisasi melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah* yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan suatu strategi yang bertujuan ganda. *Pertama*, pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu berupa *sharing of power, distribution of income* dan *kemandirian sistim*

*manajemen* di daerah. *Kedua*, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat : *Pertama*, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya daerah. *Kedua*, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. *Keempat*, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. *Kelima*, mengembangkan dan memajukan potensi yang sesuai dengan kemampuan dan kehendak masyarakat lokal dan seluruh *stakeholder* daerah. *Keenam*, mendidik dan menciptakan kader-kader pimpinan daerah yang bertanggungjawab, jujur dan disiplin serta respon terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil sumbangan pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat .

Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah pusat harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Pengaturan mengenai pembagian sumber-sumber keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kota/kabupaten mengandung tujuan-tujuan, yang antara lain dikemukakan oleh Rachman (2004: 103-105) adalah :

- (1). Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- (2). Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel) dan pasti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3). Mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan bertanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
- (4). Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
- (5). Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
- (6). Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu dalam pasal 157 disebutkan, bahwa yang termasuk ke dalam komponen sumber-sumber penerimaan daerah antara lain: 1) Pendapatan asli daerah; 2) Dana perimbangan; 3) Pinjaman daerah; dan 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Komponen-komponen tersebut merupakan sumber penerimaan daerah otonom, di mana daerah dimaksud diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan pendanaan berasal dari pendapatan asli daerah.

Sumatera Selatan merupakan salah satu dari sejumlah propinsi dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang selama pembangunan jangka panjang, tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan format yang ideal menuju arah, identitas dan eksistensi daerah yang dinamis dalam suatu tatanan sistem terpadu, mantap

dan berkelanjutan. Peluang untuk mencapai keberhasilan sebagai suatu daerah otonom, bukan merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Di samping secara geografis lebih menguntungkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain, juga mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang memberikan dukungan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan, perlu pengalokasian dana yang dibutuhkan. Alokasi dana yang dibutuhkan tersebut akan dianggarkan setiap tahunnya yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan tolok ukur dari pelaksanaan pembangunan di daerah secara menyeluruh dan terpadu. Alokasi dana yang dianggarkan dalam APBD tersebut, sangat tergantung dengan tingkat perkembangan ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, alokasi dana dalam tahun tertentu berbeda dengan alokasi dana untuk tahun selanjutnya.

Untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat perkembangan realisasi pendapatan asli dan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) propinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2006, dapat diperhatikan angka-angka seperti yang diperlihatkan dalam Tabel. 1 berikut.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan  
Periode Tahun 1993 – 2006.**

NO	TAHUN	PAD (DLM JUTA RP)	PERTUMBUHAN ( % )
1.	1993	66.479,8	-
2.	1994	69.603,2	4,7
3.	1995	74.510,1	7,1
4.	1996	77.552,4	3,9
5.	1997	119.755,6	54,4
6.	1998	190.251,7	58,9
7.	1999	289.634,6	52,2
8.	2000	334.080,4	15,4
9.	2001	493.132,6	47,6
10.	2002	596.729,5	21,0
11.	2003	682.214,2	14,3
12.	2004	814.828,9	19,4
13.	2005	939.996,4	15,4
14.	2006	1.173.820,2	24,9

Sumber : BPS Sumatera Selatan. (diolah)

Secara umum dapat dinyatakan bahwa realisasi pendapatan asli daerah propinsi Sumatera Selatan selama periode tersebut menunjukkan kenaikan secara terus menerus, kecuali jika dilihat dari sisi persentase pertumbuhan di mana nampak jelas berfluktuasi. Kenaikan dalam nilai riil secara terus menerus atau terjadinya suatu fluktuasi, sangat erat kaitannya dengan kondisi komponen-komponen pendapatan asli daerah tersebut, termasuk adanya faktor lain diluar komponen-komponen tersebut.

Naik atau turunnya pertumbuhan pendapatan asli daerah, sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka akibatnya pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Walaupun dalam prakteknya, peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga diperoleh dari pos-pos bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah dan penerimaan dari pemerintah, tetapi penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi indikator utama.

Keadaan keuangan daerah Sumatera Selatan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam proses pembangunan dan pelayanan publik sebagian besar dana yang dipergunakan adalah berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Pendapatan asli daerah hanya difokuskan kepada penerimaan daerah pajak dan retribusi. Besarnya dana perimbangan yang mengalir ke daerah Sumatera Selatan selama ini, paling tidak dalam sepuluh tahun terakhir, memperlihatkan hampir dua kali lipat dari pendapatan asli daerah. Hal ini mencerminkan adanya ketergantungan dana yang berasal dari pemerintah pusat. Prosepeknya di masa datang akan menjadi penghalang bagi daerah Sumatera Selatan untuk membiayai pembangunan dan menikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan dana sendiri. Paling tidak memperkecil tingkat ketergantungan terhadap pusat sudah menjadi prioritas tujuan yang hendak dicapai daerah ini.

Untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan dana sendiri, bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Banyak persoalan yang harus diselesaikan dan dipertimbangkan, terutama dalam menggali potensi daerah dan mengembangkan serta mengelola sumber-sumber yang ada di daerah Sumatera Selatan. Langkah-langkah pemerintah daerah dalam upaya memperkecil ketergantungan terhadap pusat, terus dilakukan dengan jalan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini jelas kelihatan dari adanya peningkatan penerimaan dalam komponen-komponen pendapatan asli daerah yang secara riil menunjukkan peningkatan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ini, bukan merupakan suatu hal yang gampang, karena banyak kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya tingkat perkembangan ekonomi daerah, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita sangat berperan. Faktor-faktor ini sangat berperan di dalam mempengaruhi usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) propinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang menarik untuk dianalisis adalah : ” Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan ”.

## TINJAUAN PUSTAKA

Upaya peningkatan keefektifan melalui penetapan sasaran pengeluaran pemerintah daerah yang tepat, dapat dilakukan dengan cara mengenali keadaan lingkungan ekonomi yang ada di daerah dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap sasaran yang dipilih dapat ditetapkan sesuai dengan peranan pemerintah yang diinginkan. Pengeluaran pemerintah daerah diharuskan seefisien mungkin dengan cara menekan pengeluaran sekecil mungkin untuk mendapatkan penerimaan seoptimal mungkin. Menurut Wagner (dalam Dumairy, 1996: 162), ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu: *Pertama*, tuntutan peningkatan perlindungan dan pertahanan. *Kedua*, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. *Ketiga*, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, perkembangan demokrasi. *Kelima*, ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Sejalan dengan makin berkembangnya suatu daerah, dan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta semakin meningkat dan beraneka ragamnya kebutuhan penduduk, maka kegiatan dan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Untuk membiayai peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah tersebut, menurut Zahari (2001: 13), diadakan peningkatan sektor penerimaan daerah, terutama yang berasal dari sumber-sumber daerah itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian daerah semakin diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan ekonomi daerah yang

berkesinambungan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan dalam menjalankan fungsinya dalam upaya menggali potensi sumber daya yang ada di daerah, terutama sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah sendiri sebagai modal dasar bagi daerah untuk memperkecil ketergantungan dana terhadap pusat.

Fenomena ini menarik untuk dikaji secara mendalam agar toleransi keuangan daerah akan menjadi realistis. Untuk menilai keberhasilan penggalan pendapatan asli daerah, tidak terlepas dari beberapa prinsip. Menurut Devas (dalam Susetyo 1995: 7), prinsip tersebut terdiri dari : *Pertama*, hasil (*yield*) yang memadai atas bentuk pelayanan. *Kedua*, keadilan (*equity*) dalam artian dasar dan beban harus sama dengan kewajiban membayar harus jelas sifatnya, horizontal atau vertikal. *Ketiga*, daya guna ekonomi (*economic efficiency*) dalam artian beban pendapatan asli daerah setidak-tidaknya tidak akan menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi. *Keempat*, kemampuan pelaksanaan (*ability to implement*) dalam artian potensi pendapatan asli daerah harus dapat dilaksanakan realisasinya secara optimal. *Kelima*, kecocokan dalam sumber-sumber penerimaan daerah (*sustainable as a local revenue sources*) dalam artian penggalan pajak harus dibayar sesuai dengan tempat akhir beban pajak, beban tidak mudah dihindari objek pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik, untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan. Sementara menurut Guritno (1993: 181), pajak adalah sumber pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan atas undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan pada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Dilihat dari sisi fungsi pajak itu sendiri, menurut Sidik (2002: 3) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai *budgeter* dan sebagai *regulator*. Fungsi budgeter, adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sementara fungsi regulator jika pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur pencapaian tujuan, misalnya pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras.

Retribusi adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimasukkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanan. Perbedaan dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisipliner konsumen utama seluruhnya merupakan sifat atau alat pemerataan. Menurut Sparmoko (2000:100), retribusi dibentuk untuk tujuan-tujuan di mana untuk ini ada keinginan politisi dan tidak ada alternatif fiskal yang cocok. Sementara menurut Davey (1988: 30), retribusi adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan.

Selanjutnya, Sparmoko (2000: 87) membagi retribusi daerah menjadi tiga (3) golongan yaitu: 1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan 3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas jasa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## Bagi laba BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan dan usaha seperti penyediaan air bersih, jasa sektor industri pertanian, perkebunan dan lain-lain. Secara umum pendirian badan usaha milik daerah (BUMD), adalah bertujuan untuk menambah penghasilan daerah, meningkatkan penyediaan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan atau kepentingan umum dan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah.

Secara khusus, pendirian badan usaha milik daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Semakin banyak perusahaan daerah yang didirikan dan menikmati keuntungan yang tinggi, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

## Penerimaan lain-lain yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah merupakan hasil penerimaan di luar pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah dan penerimaan yang berasal dari dinas-dinas. Dalam pasal 60 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, disebutkan bahwa sebagai sumber penerimaan daerah, penerimaan lain-lain mencakup antara lain penerimaan dari sewa rumah dinas milik daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, jasa giro dan lain-lain.

Berdasarkan hasil survey Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan disebutkan, bahwa sumber penerimaan daerah, pendapatan lain-lain yang sah mencakup antara lain penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi kekayaan daerah, denda keterlambatan pekerjaan daerah, sumbangan pihak ke tiga, angsuran pegawai, dinas perhubungan dan denda terhadap setiap mobil barang yang bermuatan lebih.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian Susetyo (2004), mengenai pengaruh perkembangan keuangan (APBD), ekonomi (PDRB) dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan objek penelitian pada 10 kabupaten dan kota dalam ruang lingkup penelitian propinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 1989/1990–1994/1995. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tingkat perkembangan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh perkembangan APBD bersifat *inelastis*. Sementara pengaruh perkembangan PDRB dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah bersifat *elastis*.

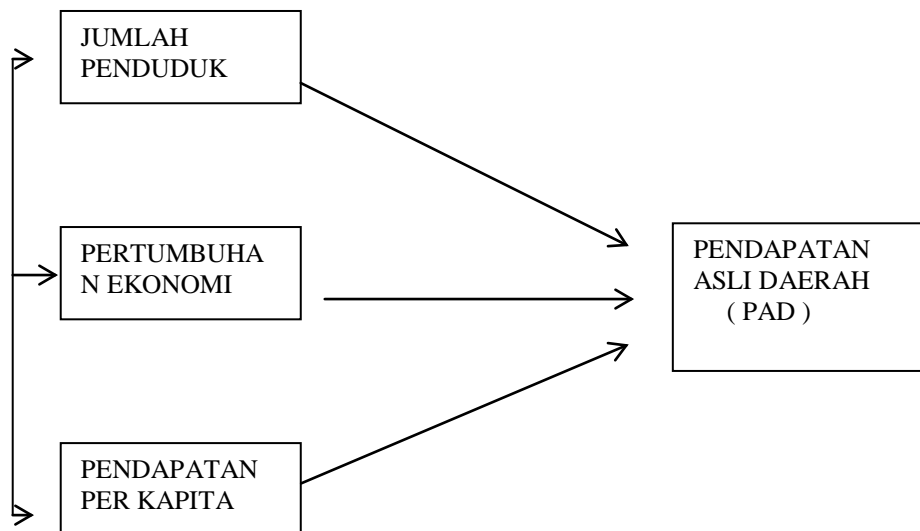
Kuncoro (2004), memfokuskan pengamatannya pada kenyataan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), sehingga ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pusat sangat tinggi. Lebih jauh Kuncoro menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan kontribusi yang sangat rendah terhadap total penerimaan daerah propinsi di Indonesia, yaitu rata-rata hanya sebesar 15,4 persen selama periode 1984/1985-1990/1991. Artinya, jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, maka subsidi dari pemerintah pusat lebih besar di dalam membiayai pengeluaran daerah. Pendapatan asli daerah propinsi hanya mampu membiayai pengeluaran rutin sebesar 30 persen. Untuk kabupaten/kota kemampuan pendapatana asli daerah hanya mampu membiayai pengeluaran rutin kurang dari 22 persen.

## Kerangka Pemikiran

Dalam teori, banyak aspek yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, di samping aspek penduduk, tanah, teknologi, skill dan wiraswasta, nampaknya aspek

keuangan (modal) lebih dominan dalam mempengaruhi pembangunan asli daerah ini dapat meningkat setiap tahunnya. Sebagai konsekuensi otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), di samping melakukan usaha penggalian terhadap potensi-potensi daerah juga diusahakan untuk mencari terobosan-terobosan serta pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif, sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat

Secara skematis, alur kerangka pemikiran dari analisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan asli daerah propinsi Sumatera selatan, dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini diyakini bahwa peningkatan pendapatan asli daerah di propinsi Sumatera Selatan, selain ditentukan oleh komponen penerimaan juga dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor dimaksud adalah jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Jika jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah propinsi Sumatera Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini merupakan bagian dari disiplin ilmu ekonomi keuangan daerah, dan lebih difokuskan pada analisis pendapatan asli daerah propinsi Sumatera Selatan, terutama komposisi penerimaan dan pengeluaran dari pendapatan asli daerah. Selanjutnya dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi pendapatan asli daerah. Sementara kurun waktu pengamatan terhadap hubungan dan perubahan komposisi tersebut mulai dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2006.

Dalam penelitian ini hanya digunakan data sekunder. Data dimaksud antara lain, pendapatan domestik regional bruto (PDRB), pendapatan asli daerah (PAD), luas wilayah, jumlah penduduk. Data tersebut diharapkan akan diperoleh dari Kantor Statistik, BAPPEDA Tingkat I, Dinas Pendapatan Daerah, dan instansi lain bila diperlukan. Sebagai pelengkap analisis, penulis juga tidak terlepas dari studi kepustakaan, terutama dalam hubungannya dengan analisis.

Data yang diperoleh tersebut akan diolah dan dianalisis, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kualitatif, data akan dikaitkan baik secara runtun mau pun secara

tabulasi silang. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah propinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dimaksud, akan digunakan perangkat analisis regresi linear dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan. Peralatan analisis kuantitatif yang dipakai adalah dengan menggunakan regresi linear, sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + U_i \quad (i = 1, \dots, n) \dots\dots\dots (1)$$

Dalam hal ini **Y<sub>i</sub>** adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan merupakan variabel terikat (dependent variable), sedangkan variabel bebas (independent variable) adalah **X** dan **U** merupakan variabel pengganggu serta **α** dan **β** adalah parameter regresi. Berdasarkan persamaan di atas, maka berikut ini diimplementasikan ke dalam bentuk:

$$Y = a + b_1 Pjkd + b_2 Retd + b_3 Pdkp + e_i \dots\dots\dots (2)$$

di mana :

- Y<sub>i</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- Jpp = Jumlah penduduk
- Peko = Pertumbuhan ekonomi
- Pdkp = Pendapatan per kapitan

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dianalisis secara kuantitatif mengenai permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pertama tulisan ini, yaitu "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan". Berdasarkan pada model yang telah disusun sebelumnya, maka secara spesifik pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Selatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita.

Adapun dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka didapat hasil estimasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 Pdd + b_2 Peko + b_3 Ipk + e_i \dots\dots\dots (3)$$

T – hitung = (2,428) (0,615) (8,964)  
 R<sup>2</sup> = 0,927; R = 0,963; F-hitung = 37.843

Dalam persamaan regresi sederhana seperti telah dicantumkan pada bagian terdahulu adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 Pdd + b_2 Peko + b_3 Ipk + e_i \dots\dots\dots (4)$$

dimana :

- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- Pdd = Jumlah penduduk
- Peko = Pertumbuhan ekonomi
- Ipk = Pendapatan perkapita.

$$Y = - 36604.16 + 481032.57 Pdd + 4532.665 Peko + 242119.54 Ipk \dots (5)$$

t-hitung = (8,964) (0,615) (2,426)  
 R<sup>2</sup> = 0,927; R = 0,963; F-hitung = 37.843.



Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen, dilakukan uji statistik (uji - t). Uji Statistik ini bertujuan untuk melihat tingkat signifikan dari masing-masing variabel dependen secara individual terhadap variabel independen, dengan asumsi bahwa variabel-variabel yang lain adalah konstan (tidak berubah). Nilai t-tabel diperoleh dengan cara menentukan derajat kebebasan sebesar  $n - k$ , di mana  $n$  adalah jumlah data yang diamati (diteliti), sedangkan  $k$  adalah banyaknya koefisien yang terdapat dalam persamaan.

Dengan tingkat keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5\%$ ), dan dengan kebebasan  $n - k$ , yakni  $13 - 3 = 10$ , maka diperoleh t-hitung masing-masing sebesar sebesar 8,964 jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi 0,615 dan pendapatan per kapita 2.426 Tabel berikut menunjukkan signifikan atau tidaknya masing-masing variabel. Jika hasil estimasi menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel, maka dinyatakan bahwa variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen.

**Tabel 2. Hasil Estimasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan**

Variabel	: Koefisien	: t - hitung	: t - tabel	: Signifikan
Konstanta	: - 36604.16	7,568		
Pdd	: 481032.57	8,964	2,228	Signifikan
Peko	: 8,233	0,615	2,228	Tidak Signifikan
Pend/kapita	: 242119.54	2,426	2,228	Signifikan

$R^2 = 0,927$ ;  $R = 0,963$ ; F-hitung = 37.843; F-tabel = 3,41

Angka-angka seperti terlihat dalam Tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa variabel-variabel jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara statistik berpengaruh nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Selatan.

Selanjutnya, untuk mengetahui secara simultan digunakan uji-F dengan tingkat signifikan 5 persen ( $\alpha = 5\%$ ), dan dengan derajat kebebasan (df)  $N1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$  dan  $N2 = n - k = 13 - 3 = 10$ , maka diperoleh F-tabel sebesar 4,60 dan F-hitungnya adalah sebesar 817,436. Ternyata F-hitung lebih besar daripada F-tabel (F-hitung = 37,843 > F-tabel = 4,60). Artinya, sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dalam artian bahwa variabel-variabel bebas (jumlah penduduk dan pendapatan per kapita) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Dari hasil estimasi model, diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.927, ini berarti bahwa variabel bebas yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (pendapatan asli daerah) yaitu sebesar 92,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 7,3 persen merupakan faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan. Untuk melihat hubungan keeratan antar variabel dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (R), di mana dari hasil estimasi R adalah sebesar 0,963, artinya ada hubungan yang sangat erat antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dengan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 96,3 perse

Dari estimasi model tersebut, diperoleh nilai koefisien masing-masing variabel dependen, yaitu : 481032.57 jumlah penduduk, 4532.665 pertumbuhan ekonomi dan 242119.54 pendapatan perkapita. Artinya dalam hal ini adanya perubahan searah antara variabel dependen dan variabel independen. Dari ketiga variabel dependen tersebut, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan asli daerah. *Pertama*, jumlah penduduk dengan nilai koefisien regresi sebesar 481032.57 menunjukkan hubungan positif terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien tersebut berarti setiap penambahan sebesar satu juta jiwa terhadap nilai, maka pendapatan asli daerah akan bertambah sebesar 481032.57 juta rupiah. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien regresi sebesar 4532.665 menunjukkan

bahwa setiap penambahan satu juta rupiah nilai retribusi, maka pendapatan asli daerah akan bertambah sebesar 4532.665 juta rupiah. *Ketiga*, pendapatan per kapita adalah sebesar 242119.54 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu juta rupiah nilai pendapatan per kapita, maka pendapatan asli daerah akan bertambah sebesar 242119.54 juta rupiah.

## PENUTUP

Melalui uji-F diketahui, bahwa F-hitung adalah 37,843 dan F-tabel adalah 3,41 atau F-hitung > F-tabel. Artinya, variabel bebas yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Melalui hasil estimasi diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,927, berarti bahwa 92,7 persen variabel terikat (pendapatan asli daerah) dipengaruhi oleh variabel bebas (jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Koefisien korelasi ( R ) sebesar 0,963, artinya bahwa ada hubungan yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat hubungan antara variabel bebas (jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita) dengan variabel terikat ( pendapatan asli daerah ) adalah sebesar 96,3 persen.

Perlu dimasyarakatkan secara lebih insentif kepada propinsi, bahwa dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan melalui pendapatan asli daerah (PAD), harus diperhatikan rambu-rambu dari peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan pengawasan dan segera menghapus pungutan-pungutan yang berada di luar koridor hukum yang sudah ada.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aklil, Maulana. 2003. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Tesis, Tidak Dipublikasikan, FEPPS - UNSRI.Palembang.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi, Peluang dan Kendala*, Erlangga, Jakarta.
- Davey, K.j. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Edisi Terjemahan Amanullah Dkk, UI - Press, Jakarta.
- Dumariry. 1996. *Perekonomian Indonesia*, Erlangga (anggota IKAPI), Jakarta.
- Ismail, Munawar. 2004, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah, Lintas Ekonomi*, Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, A Verroes Press, Malang.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*, Edisi ke tiga, BPFE-Yogyakarta.
- Musgrave. 1991. *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sidik, Mahfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta.
- Rachman, Sjaiful H.M. 2004. *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Kabinet Gotong Royong*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Ekonometrika, Pengantar*, Edisi ke tiga, BPFE- Yogyakarta.
- Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Pratek*, BPFE, Yogyakarta.
- Susetyo, Didik. 2004. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Otonomi Daerah, Studi Empirik Keuangan Daerah*

- Kabupaten/Kota di Indonesia*, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, Tidak Dipublikasikan.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No 33 Tahun 2004*, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Fokus Media, Bandung.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zahari, Ms, M. 2001. *Analisis PAD Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Tesis, Tidak Dipublikasikan, PPS-UNSRI, Palembang.